# BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

 Peneliti melakukan penelitian yang didukung dari hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pemberdayaan remaja oleh Karang Taruna. Hasil penelitian terdahulu akan disesuaikan dengan hasil lapangan yang dilakukan oleh peneliti. Dengan demikian hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Hasil Penelitian terdahulu**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Tittle** | **Author** | **DOI** | **Hasil Penelitian** |
| 1. | Peran Karang Taruna dalam Mewujudkan Tanggung Jawab Sosial Pemuda sebagai Gerakan Warga Negara | Febri Fajar Pratama, Rahmat Rahmat | <https://doi.org/10.21831/jc.v15i2.19182> | Hasil dari temuan dilapangan bahwa Karang Taruna memiliki peranan yang sangat baik dalam pemberdayaan pemuda, memupuk rasa tanggung jawab sosial serta membantu pemerintah daerah dalam menangani pengentasan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang menjadi tujuan Karang Taruna dibentuk. |
| 2.  | Pemberdayaan Remaja Karang Taruna melalui Program Remaja Pintar Berbasis Agama Desa Wisata Kandri Kota Semarang | Muslam, Fatkuroji dan Munto’liah | **DOI:**[10.21580/dms.2016.161.896](https://doi.org/10.21580/dms.2016.161.896) | Hasil dari penelitian bahwasanya Karang Taruna dalam pemberdayaan remaja dengan adanya pelatihan dan praktik bagi para remaja dapat bergerak maju dan memiliki kemandirian |
| 3.  | Pemberdayaan Remaja Karang Taruna RT 7 RW 9 Kelurahan Gemah Kota Semarang Melalui Pelatihan Keterampilan Membatik | Muhtarom, M.Saifudin Z, D. Nuvitalia, Bambang AH, dan Ernawati S. | **DOI:**[**https://doi.org/10.31316/jbm.v3i2.1459**](https://doi.org/10.31316/jbm.v3i2.1459) | Hasil dari penelitian ini yang dilakukan oleh Karang Taruna RT 7 RW 9, dengan adanya penyampaian, pelatihan dan pendampingan oleh mitra kegiatan dan adanya Karang Taruna dalam pemberdayaan bahwasanya para peserta dari pelatihan memiliki pemahaman dan keterampilan serta dapat mempraktikkan proses membatik |
| 4. | Pemberdayaan Karang Taruna di Kelurahan Matali Kecamatan Kotamobagu Timur | Dicky W, Arie JR, dan Joorie MR | [**https://doi.org/10.31316/jbm.v3i2.1454**](https://doi.org/10.31316/jbm.v3i2.1454) | Hasil dari penelitian ini bahwa Karang Taruna Kelurahan Matali bisa menciptakan suasana yang membuat potensi sumber daya manusia di Kelurahan Matali berkembang.  |
| 5. | Pemberdayaan Remaja Karang Taruna dan Masyarakat melalui Keterampilan Desain Grafis Guna Mengembangkan Pengetahuan dan Pemberian Informasi di Desa Mandalle Kab. Pangkep | Zaifah F, Nurul M, Ramlah H dan Zakis DU | [**https://doi.org/10.31316/jbm.v3i2.1450**](https://doi.org/10.31316/jbm.v3i2.1450) | Hasil dari penelitian ini bahwasanya dengan adanya program pelatihan komputer pemberdayaan remaja kepada Karang Taruna dan kepada masyarakat, pencapaian hasilnya ialah meningkatnya pengetahuan dan keterampilan kelompok Karang Taruna serta meningkatnya pengetahuan Karang Taruna dan masyarakat dalam menggunakan internet  |
| 6 | Pemberdayaan Kelompok Karang Taruna dalam mewujudkan Desa Mandiri di Desa Manding Daya Kecamatan Manding | Raudatur R, Ida S, dan Achmad A | [**https://doi.org/10.31316/jbm.v3i2.3459**](https://doi.org/10.31316/jbm.v3i2.3459) | Hasil dari penelitian ini Karang Taruna Desa Manding Daya dalam peningkatan Peran Pemuda yakni adanya peningkatan efisiensi dan efektivitas, peningkatan kompetensi diri secara otomatis dan peningkatan peran dalam setiap kegiatan |
| 7 | Strategi Karang Taruna dalam Membina Generasi Muda di Desa Tunggilis Kecamatan Kalicupang Kabupaten Pangandaran | Cahyono | [**https://doi.org/10.31316/jbm.v3i2.167**](https://doi.org/10.31316/jbm.v3i2.167) | Hasil dari penelitian ini menghasilkan adanya pembinaan terhadap para remaja, pembinaan terhadap remaja putus sekolah dan adanya pembinaan terhadap remaja yang tidak memiliki pekerjaan. Yang juga mendapatkan hasil yang cukup baik bagi Karang Taruna sebagai fasilitator untuk pemberdayaan remaja |
| 8 | Pelaksanaan Program Karang Taruna dalam Pembinaan Remaja di Kenagarian Sitiung | Mitra Anggita S dan M. Prima Ersya  | **149-157.** [**https://doi.org/10.24036/jce.v1i2.236**](https://doi.org/10.24036/jce.v1i2.236) | Hasil dari penelitian ini dari beberapa pelaksanaan program Karang Taruna ini memberikan dampak yang positif bagi pengurus, remaja dan masyarakat. Dan juga berfungsi dalam membina remaja kearah positif dengan mendirikan program kegiatan yang membawa remaja untuk bersosialisasi dan mengurangi angka kenakalan remaja. |
| 9 | Pemberdayaan Pemuda Karang taruna melalui Sinau Bareng Ademos indonesia  | Nurul Istifadhod | [**https://doi.org/10.24036/jce.v1i2.238**](https://doi.org/10.24036/jce.v1i2.238) | Hasil dari penelitian ini bahwasanya meningkatnya kapasitas pemuda Karang Taruna yang berkompetensi dan berdaya saing, karena hadirnya pihak ADEMOS dalam membantu masyarakat yakni Karang Taruna guna mewujudkan kesejahteraan dengan pendidikan dan pendampingan |
| 10 | Pemberdayaan Masyarakat melalui Karang Taruna Medal Jaya di Desa Cijemit Kecamatan Ciniru Kabupaten Kuningan  | Istiqomah | [**https://doi.org/10.24036/jce.v1i2.267**](https://doi.org/10.24036/jce.v1i2.267) | Hasil dari penelitian ini dari beberapa program Karang Taruna dan dari masing-masing bidang di dalam Karang Taruna melakukan adanya program kegiatan pemberdayaan dan memiliki hasil partisipasi dari masyarakat yang tertarik dan mendapatkan hasil positif dari pemberdayaan tersebut.  |

 Maka dapat disimpulkan dari penelitian terdahulu bahwasanya Pemberdayaan Remaja oleh Karang Taruna di lingkup masyarakat memiliki peran yang sangat berpengaruh dan dapat membuahkan hasil baik dari pemberdayaan yang dimana para remaja memiliki pengetahuan, kemampuan dan kemandirian.

## 2.2 Konsep Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial mencakup berbagai tindakan yag dilakukan manusia untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik, taraf hidup yang dimaksud merupakan hal yang tidak diukur secara ekonomi maupun fisip saja, melainkan menata kehidupan sosial dan kebutuhan spiritual manusia. Kesejahteraan sosial merupakan sebuah kondisi dimana manusia, secara individu maupun masyarakat dalam konteks kesehatan, keadaan, ekonomi, kebahagiaan, dan kualitas hidup masyarakat.

### 2.2.1 Pengertian Kesejahteraan Sosial

Konsep kesejahteraan sosial sebagai suatu program yang terorganisir dan sistematis dan dilengkapi dengan segala macam keterampilan ilmiah,merupakan subuah konsep yang relative baru berkembang. Adapun kesejahteraan sosial menurut yaitu :

Kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisasi dari usaha-usaha sosial dan lembaga-lembaga yang ditujukan untuk membantu individu maupun kelompok dalam mencapai standar hidup dan kesehatan yang memuaskan, serta untuk mencapai relasi perseorangan dan sosial dengan relasi-relasi pribadi dan sosial yang dapat memungkinkan mereka mengembangkan kemampuan-kemampuan mereka secara penuh, serta untuk mempertinggi kesejahteraan mereka selaras dengan kebutuhan- kebutuhan keluarga dan masyarakat.(Fahrudin, 2014, p. 9)

Berdasarkan definisi diatas menunjukkan bahwa kesejahteraan sosial merupakan suatu sistem yang terorganisir dalam suatu lembaga yang bertujuan untuk membantu individu mencapai kehidupan yang sejahtera dengan meningkatkan kemampuan individu atau kelompok secara penuh agar dapat memecahkan masalahnya sendiri maupuan dalam memenuhi kebutuhannya.

Kesejahteraan sosial bisa dipandang sebagai ilmu dan disiplin akademis. Dalam hubungan ini, kesejahteraan sosial adalah studi tentang lembaga-lembaga, program-program, personel, dan kebijakan-kebijakan yang memutuskan pada pemberian pelayanan-pelayanan sosial kepada individu-individu, kelompok-kelompok, dan masyarakat. Ilmu kesejahteraan sosial berupaya mengembangkan basis pengetahuannya untuk mengidentifikasi masalah sosial, penyebabnya dan strategi penanggulangannya, adapun kesejahteraan sosial adalah:

Suatu institusi atau bidang kegiatan yang melibatkan aktivitas terorganisir yang diselenggarakan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial dan peningkatan kualitas hidup individu, kelompok dan masyarakat. (Suharto, 2017)

 Definisi kesejahteraan sosial menurut Suharto diatas bahwa kesejahteraan sosial adalah suatu kegiatan yang terorganisir yang dilakukan oleh lembaga pemerintah maupun swasta dan bertujuan untuk mencegah dan membantu mengatasi masalah sosial serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

### 2.2.2 Tujuan Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan Sosial mempunyai tujuan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, perumahan, pangan, kesehatan, dan relasi ocial yang harmonis dengan lingkungannya.
2. Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, misalnya dengan menggali sumber-sumber, meningkatkan, dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan. (Fahrudin, 2014, p. 10)

Mengembangkan tiga tujuan utama dan social kesejahteraan social yang sampai tingkat tertentu tercermin dalam semua program kesejahteraan social, yaitu pemeliharaan social, pengawasan social, dan perubahan social. Penjelasalan mengenai pemeliharaan sistem, pengawasan sistem, dan perubahan sistem diantaranya sebagai berikut:

1. Pemeliharaan Sistem Pemeliharaan dan menjaga keseimbangan atau kelangsungan keberadaan nilainilai dan norma ocial serta aturan-aturan kemasyarakatan dalam masyarakat, termasuk hal-hal yang bertalian dengan definisi makna dan tujuan hidup; motivasi bagi kelangsungan hidup seseorang dalam perorangan, kelompok ataupun di masyarakat. Kegiatan system kesejahteraan ocial untuk mencapai tujuan semacam itu meliputi kegiatan yang diadakan untuk sosialisasi terhadap norma-norma yang dapat diterima, peningkatan pengetahuan dan kemampuan untuk mempergunakan sumber-sumber dan kesempatan yang tersedia dalam masyarakat melalui pemberian informasi, nasihat dan bimbingan, seperti penggunaan system rujukan, fasilitas pendidikan, kesehatan dan bantuan ocial lainnya.
2. Pengawasan Sistem Melakukan pengawasan secara efektif terhadap perilaku yang tidak sesuai atau menyimpang dari nilai-nilai ocial. Kegiatan-kegiatan kesejahteraan ocial untuk mencapai tujuan semacam itu meliputi fungsi-fungsi pemeliharaan berupa kompensasi, sosialisasi, peningkatan kemampuan menjangkau fasilitas-fasilitas yang ada bagi golongan masyarakat yang memperlihatkan penyimpangan tingkah laku. C) Perubahan Sistem Mengadakan perubahan kea rah berkembangnya suatu system yang lebih efektif bagi anggota masyarakat (Effendi, 1982; Zastrow, 1982). Dalam mengadakan perubahan itu ocial kesejahteraan ocial merupakan instrument untuk menyisihkan hambatan-hambatan terhadap partisipasi sepenuhnya dan adil bagi anggota masyarakat dalam pengambilan keputusan; pembagian sumber-sumber secara lebih pantas dan adil; dan terhadap penggunaan struktur kesempatan yang tersedia secara adil pula. (Fahrudin, 2014, p. 10)

### 2.2.3 Fungsi Kesejahteraan Sosial

Fungsi – fungsi kesejahteraan sosial bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi tekanan – tekanan yang diakibatkan terjadinya perubahan – perubahan sosio-ekonomi, menghindarkan terjadinya konsekuensi – konsekuensi sosail yang negatif akibat pembangunan serta menciptakan kondisi – kondisi yang mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Fungsi kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut:

* 1. Fungsi Pencegahan (*Preventive*).

Kesejahteraan sosial ditujukan untuk memperkuat individu, keluarga, dan masyarakat suapaya terhindar dari masalah-masalah sosial baru. Dalam masyarakat transisi, upaya pencegahan ditekankan pada kegiatan-kegiatan untuk membantu menciptakan pola-pola baru dalam hubungan sosial serta lembaga-lembaga sosial baru.

* 1. Fungsi Penyembuhan (*Curative*).

Kesejahteraan sosial ditujukan untuk menghilangkan kondisi- kondisi ketidakmampuan fisik, emosional, dan sosial agar orang yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat.Dalam fungsi ini juga tercakup dengan fungsi pemulihan atau rehabilitasi.

* 1. Fungsi Pengembangan (*Development*).

Kesejahteraan sosial berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat

* 1. Fungsi Penunjang (*Supportive*).

Fungsi ini mencakup kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sektor atau bidang pelayanan sosial yang lain. (Fahrudin, 2014, p. 12)

Melihat kutipan di atas bahwa adanya fugsi dalam kesejahteraan sosial, untuk membantu atau proses pertolongan baik individu, kelompok, ataupun masyarakat agar dapat berfungsi kembali dengan menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial. Serta terhindar dari masalah-masalah sosial baru dan mengurangi tekanan-tekanan yang diakibatkan dari terjadinya perubahan-perubahan dari sosio-ekonomi.

### 2.2.4 Pendekatan Kesejahteran Sosial

Pendekatan-pendekatan kesejahteraan sosial merupakan hal yang penting bagi penunjang pekerja sosial dalam pelaksanaan aktivitas keilmuan dan praktik kesejahteraan sosial. Pendekatan- pendekatan kesejahteraan sosial sebagai berikut:

* + - 1. Filantropi sosial

Filantropi terkait erat dengan upaya-upaya kesejahteraan sosial yang dilakukan para agamawan dan relawan, yakni upaya yang bersifat amal (*charity*) dimana orang-orang ini menyumbangkan waktu, uang, dan tenaganya untuk menolong orang lain. pelaku dari filantropi ini disebut dengan filantropis

* + - 1. Pekerjaan sosial

Berbeda dengan pendekatan yang sebelumnya yaitu filantropi pekerjaan sosial disini merupakan pendekatan yang teroganisir untuk mempromosikan kesejahteraan sosial dengan menggunakan tenaga professional yang memenuhi syarat untuk menangani masalah sosial. Perkembangan pekerjaan sosial sendiri juga tidak lepas dari adanya filantropi. Pada abad ke-19 pekerjaan sosial telah mengalami pengembangan professional dan akademik yang cukup pesat dan telah menyebar di seluruh dunia.

* + - 1. Administrasi sosial

Pendekatan administrasi sosial berusaha mempromosikan kesejahteraan sosial dengan menciptakan berbagai macam program guna meningkatkan kesejahteraan warga negaranya, biasanya dengan penyediaan pelayanan sosial. Pendekatan ini dilakukan oleh pemerintah.

* + - 1. Pembangunan sosial

Pembangunan sosial merupakan suatu proses perubahan sosial terencana yang dirancang untuk meningakatkan taraf hidup masyarakat secara utuh, di mana pembangunan ini dilakukan untuk melengkapi dinamika proses pembangunan ekonomi. (Fahrudin, 2014, p. 51)

Pendekatan kesejahteraan dalam implementasinya dapat ditempuh dengan melakukan peningkatan kesejahteraan. Paradigma intervensi dan praktik pekerjaan sosial harus lebih diarahkan kepada hal yang lebih komprehensif.Bukan hanya pendampingan sosial akan tetapi harus pendekatan sosial dan ekonomi, sehingga capaian ideal mengenai kesejahteraan sosial dapat terwujud.Pendekatan kesejahteraan sosial terdiri dari filantropi sosial, pekerjaan sosial, adminitrasi sosial dan pembangunan sosial. Filantropi yang sifatnya charity atau awal merupakan pendekatan yang pertama sebelum berkembang pada pendekatan yang lainnya. Setelah adanya filantropi sosial, muncul pendekatan kedua yaitu pekerjaan sosial yang lebih fokus pada penanganan masalah sosial. Administrasi sosial yang lebih dikenal dengan pemberian program atau pelayanan sosial dari pemerintah untuk masyarakat nya. Yang terakhir adalah pembangunan sosial yang erat kaitannya dengan pembangunan ekonomi, pembangunan sosial disini harus terencana karena bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

### 2.2.5 Konsep Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial merupakan aktifitas propesional untuk membantu individu, kelompok, atau masyarakat dalam meningkatkan atau memperbaiki kemampuannya berfungsi sosial serta menciptakan kondisi-kondisi yang menunjang tujuan tersebut.Pekerjaan sosial merupakan profesi yang profesional melakukan pertolongan yang memperhatikan relasi antara manusia dengan lingkungan inter pribadi maupun organisasional dengan memberikan pertolongan untuk mengubah atau meningkatkan kualitas hubungan antar manusia dengan lingkungannya serta mengembangkan lingkungan sosial agar dapat mendukung kesejahteraan manusia. Menurut Asosiasi nasional pekerjaan sosial amerika serikat (NASW) adalah sebagai berikut:

*Social work is the professional activity of helping individuals, groups or communities to enhance or restore their capacity for social functioning and to create societal conditions favorable to their goals. Social work practice consist of the professional application of social work values, principles, and techniques to on or more of the following ends: helping people obtain tangible services; providing counselling and psychoteraphy for individuals, families, and groups; helping communities or groups; helping communities or groups provide or improve social and health services; and participating in relevant legislative processes. The practice of social work requires knowledge of human development and behavior; of social, economic, and cultural intitutions; and of the interaction of all these factors.* (Fahrudin, 2014, p. 60)

Pekerjaan sosial adalah kegiatan profesional untuk membantu individu, kelompok, atau komunitas untuk meningkatkan atau memulihkan kapasitas mereka untuk fungsi sosial dan untuk menciptakan kondisi sosial yang menguntungkan bagi tujuan mereka. Praktik pekerjaan sosial terdiri dari penerapan nilai-nilai, prinsip, dan teknik pekerja sosial secara profesional pada atau lebih dari. Pekejaan sosial juga memiliki tujuan sebagai berikut: membantu orang mendapatkan layanan nyata; memberikan konseling dan psikoterapi untuk individu, keluarga, dan kelompok; membantu masyarakat atau kelompok; membantu masyarakat atau kelompok memberikan atau meningkatkan layanan sosial dan kesehatan; dan berpartisipasi dalam proses legislatif yang relevan. Praktek pekerjaan sosial membutuhkan pengetahuan tentang perkembangan dan perilaku manusia; dari intitusi sosial, ekonomi, dan budaya; dan interaksi semua faktor ini.

Berdasarkan kutipan di atas, pekrja sosial menerapkan nilai dan prinsip pekerja sosial dalam membantu individu, keluarga, atau kelompok dan masyarakat agar bisa memenuhi kebutuhannya sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan keberfungsian sosial tersebut dapat dicapai apabila dapat memenuhi kebutuhan material,spiritual, dan sosial.

Keberfungsian sosial adalah suatu konsep untuk memenuhi kesejahteraan sosial, dan merupakan konsep penting bagi pekerja sosial. Keberfungsian sosial juga merupakan konsep pembeda antara profesi pekerjaan sosial dengan profesi lainnya. Tujuan utama dari kesejahteraan sosial adalah untuk mewujudkan keberfungsian sosial manusia, supaya dapat memenuhi kebutuhan dan tercapainya relasi serta adaptasi dengan lingkungan secara baik di masyarakat. Kesejahteraan sosial bertujuan untuk dapat mengurangi tekanan-tekanan yang mengakibatkan konsekuensi sosial yang negative akibat pembangunan serta dapat menciptakan kondisi yang mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Fungsi-fungsi kesejahteraan diantaranya sebagai berikut:

* + - 1. Fungsi Pencegahan (Preventive)

Kesejahteraan sosial ditujukan untuk memperkuat individu, keluarga, dan masyarakat supaya terhindar dari masalah-masalah sosial baru. Dalam masyarakat transisi, upaya pencegahan ditekankan pada kegiatan-kegiatan untuk membantu menciptakan pola-pola baru dalam hubungan sosial serta lembagalembaga sosial baru.

* + - 1. Fungsi Penyembuhan (Curative)

Kesejahteraan sosial ditujukan untuk menghilangkan kondisi-kondisi ketidakmampuan fisik, emosional, dan sosial agar orang yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam mayarakat. Dalam fungsi ini tercakup juga fungsi pemulihan (rehabilitasi).

3. Fungsi Pengembangan (Development)

Kesejahteraan sosial berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat.

1. Fungsi Penunjang (Supportive)

Fungsi ini mencakup kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sektor atau bidang pelayanan kesejahteraan sosial yang lain. (Fahrudin, 2014, p. 12)

Fungsi-fungsi tersebut berusaha dicapai untuk mengurangi tekanan dan mencegah masalah sosial baru. Secara kompleks fungsi-fungsi kesejahteraan sosial masing-masing fungsinya memiliki fokus tersendiri. Diantaranya fungsi pencegahan ditujukan untuk memperkuat setiap orang untuk terhindar dari masalah, lalu fungsi pengembangan bertujuan untuk dapat memberi pembangunan melalui proses pengembangan di tatanan dan sumber daya sosial dalam masyarakat. Secara tradisional pekerjaan sosial dikatakan mempunyai tiga metode pembantu, diantaranya sebagai berikut:

metode pokok tersebut yaitu: “(1) Metode Pokok : *social case worl, social group work* dan *community organization/community development.*(2) Metode Pembantu : *social work administration, social action,* dan *social work research”.* (Fahrudin, 2014, p. 71)

Metode tersebut sama-sama penting dalam menjalankan peranannya. Penggunaan metode tersebut tergantung pada kasus atau permasalahan klien yang bersangkutan, kemampuan dari pekerja sosialpun menentukan apakah penggunaan metode tersebut dapat berhasil atau tidak dalam memecahkan permasalahan klien.

### 2.2.6 Fokus Pekerjaan Sosial

Fokus pekerjaan sosial adalah untuk mengembalikan keberfungsian sosial, maka merujuk pada praktik pekerjaan sosial memiliki tujuan praktik pekerjaan sosial. Tujuan praktik pekerjaan sosial menurut NASW adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan-kemampuan orang untuk memecahkan masalah, mengatasi (*coping*), perkembangan.
2. Menghubungkan orang dengan sistem-sistem yang memberikan kepada mereka sumber-sumber, pelayanan-pelayanan, dan kesempatan-kesempatan.
3. Memperbaiki kefeektifan dan bekerjanya secara manusiawi dari sistem-sistem yang menyediakan orang dengan sumber-sumber dan pelayanan-pelayanan.
4. Mengembangkan dan memperbaiki kebijakan sosial. (Fahrudin, 2014, p. 66)

Bahwasannya profesi pekerjaan sosial berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan sosial individu, kelompok, dan masyarakat. Hal tersebut merupakan upaya yang dilakukan dalam praktik pekerjaan sosial untuk meningkatkan kemampuan dan mengatasi masalah hingga menghubungkan kepada sistem sumber dan pelayanan-pelayanan sosial untuk memperbaiki kebijakan sosial yang ada.

### 2.2.7 Fungsi Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial dalam penyelenggaraanya meliputi fungsi – fungsinya tersendiri.Penunjang terhadap tujuannya juga yaitu membagi fungsi dasar pekerjaan sosial menjadi empat bagian sebagai berikut :

* + - 1. Mengembangkan memelihara dan memperkuat sistem kesejahteraan sosial sehingga dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar manusia.
			2. Menjamin memadainya standar-standar subsistensi kesehatan dan kesejahteraan bagi semua orang.
			3. Meningkatkan kemampuan orang untuk melaksanakan fungsinya secara optimal sesuai dengan status dan peranan mereka di dalam institusi-institusi sosial.
			4. Mendorong dan meningkatkan ketertiban sosial (*social order*) serta struktur institusional masyarakat. (Sukoco, 1992, pp. 52–54)

Berdasarkan kutipan diatas, dapat diketahui bahwa fungsi-fungsi pekerjaan sosial itu berfokus pada kebutuhan-kebutuhan dasar, standar-standar, kesehatan, kesejahteraan. Status dan peranan dalam institusi sosial, ketertiban sosial, serta instutisional yang ada pada masyarakat untuk tercapainya keberfungsian sosial.

### 2.2.8 Prinsip-Prinsip Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial sebagai proses yang tentunya profesional, dalam ketentuannya memiliki prinsip-prinsip yang menaungi dan mengiringi dalam kelangsungannya. Enam prinsip dasar dalam praktek pekerjaan sosial yaitu sebagai berikut:

1. Penerimaan

Prinsip ini mengemukakan tentang pekerja sosial yang menerima klien tanpa “menghakimi” klien tersebut sebelum, pekerja sosial untuk menerima klien dengan sewajarnya (apa adanya) akan lebih membantu pengembangan relasi antara pekerja sosial dengan kliennya. Dengan adanya sikap menerima (menerima keadaan klien apa adanya) maka klien akan dapat lebih percaya diri dan dengan demikian ia (klien) dapat mengungkapkan berbagai macam perasaan dan kesulitan yang mengganjal di dalam pembicaraan.

1. Komunikasi

Prinsip komunikasi ini dengan mudah dapat mendukung. Untuk komunikasi dengan klien, baik dalam bentuk komunikasi yang verbal, yang meminta klien melalui sistem klien maupun bentuk komunikasi nonverbal, seperti cara membuka klien, memilih cara duduk, duduk dalam suatu pertemuan dengan anggota keluarga yang lain.

1. Individualisasi

Prinsip individualisasi pada intinya mempertimbangkan setiap individu yang berbeda satu sama lain sehingga seorang pekerja sosial haruslah mengatur cara memberi kliennya guna mendapatkan hasil yang diinginkan.

1. Partisipasi

Berdasarkan prinsip ini, seorang pekerja sosial harus meminta kliennya untuk mendorong aktif dalam upaya memecahkan masalah yang dihadapinya, sehingga klien dapat menggunakan sistem klien yang juga menyediakan rasa bantuan untuk bantuan tersebut. Karena tanpa ada kerja sama dan peran serta klien maka upaya bantuan sulit untuk mendapatkan hasil yang optimal.

1. Kerahasiaan

Prinsip kerahasiaan ini akan memungkinkan klien atau sistem klien mengungkapkan apa yang sedang ia rasakan dan bahaya ia hadapi dengan rasa aman, karena ia yakin apa yang ia utarakan dalam hubungan kerja dengan pekerja sosial akan tetap dijaga (dirahasiakan) oleh pekerja sosial agar tidak diketahui oleh orang lain (mereka yang tidak berkepentingan).

1. Kesadaran diri pekerja sosial

Prinsip kesadaran diri ini menuntut pekerja sosial untuk menjalin relasi profesional dengan menjalin relasi dengan kliennya, dalam arti pekerja sosial yang mampu menggerakkan benar-benar terhanyut oleh perasaan atau bantuan yang disampaikan oleh kliennya tidak “kaku” dalam percakapan dengan pekerja sosial, yang pesan informasi atau cara bicara, cara berbicara, dan lain-lain, bantuan dengan setiap tanggung jawab terhadap keberhasilan proses. (Fahrudin, 2014, pp. 16–19)

Berdasarkan kutipan diatas, pekerja sosial harus menerima klien tanpa memandang seseorang berasalah dari keluarga mampu atau tidak menerima siapapun yang membutuhkan pertolongan tanpa melihat ras,suka,dan agama. Pekerja sosial menawarkan beberapa alternatif dalam penyelesaian masalah dan klien mempunyai hak untuk memilih jalannya dalam menyelesaikan masalahnya. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut pekerja sosial diharapakan untuk berprilaku etis, namun tanggungjawab utama untuk tingkah laku etik, setidak-tidaknya ditentukan ditentukan/diperintah oleh kode etik pekerjaan sosial yang ditujukan untuk oleh pekerja sosial.

### 2.2.9 Tahapan-tahapan Intervensi Pekerjaan Sosial

Intervensi yang dilakukan oleh pekerja sosial akan melalui beberapa tahapan, dalam pelaksanaannya. Tahapan-tahaoan ini disebut dengan tahapan intervensi pekerjaan sosial, terdapat enam intervensi pekerjaan sosial yaitu sebagai berikut :

1. Tahap *engangement, intake* dan *contract*

Tahap ini adalah tahap permulaan pekerja sosial bertemu dengan klien. Dalam proses ini terjadi pertukaran informasi mengenai apa yang dibutuhkan klien, pelayanan apa yang akan diberikan oleh pekerja sosial dan lembaga sosial dalam membantu klien memenuhi kebutuhan klien atau memecahkan masalah klien. Kontrak diartikan sebagai suatu kesepakatan antara pekerja sosial dengan klien yang di dalamnya dirumuskan hakekat permasalahan klien, tujuan-tujuan pertolongan yang hendak dicapai, peranan-peranan dan harapan-harapan pekerja sosial dengan klien, metode-metode pertolongan yang akan digunakan serta pengaturan-pengaturan lainnya.

1. Tahap *Assessment*

*Assessment* merupakan proses pengungkapan dan pemahaman masalah klien yang meliputi: bentuk masalah, ciri-ciri masalah, ruang lingkup masalah, faktor-faktor penyebab masalah, akibat dan pengaruh masalah, upaya pemecahan masalah yang terdahulu yang pernah dilakukan klien, kondisi keberfungsian klien saat ini dan berdasarkan hal itu semua maka dapat ditentukan fokus atau akar masalah klien.

1. Tahap Membuat Perencanaan Intervensi

Rencana intervensi merupakan proses rasional yang disusun dan dirumuskan oleh pekerja sosial yang meliputi kegiatan-kegiatan apa yang dilakukan untuk memecahkan masalah klien, apa tujuan pemecahan masalah tersebut.

1. Tahap Melaksanakan Program Berdasarkan Rencana Intervensi

Pekerja sosial mulai melaksanakan program kegiatan pemecahan masalah klien. Dalam pemecahan masalah ini hendaknya pekerja sosial melibatkan klien secara aktif pada setiap kegiatan.

1. Tahap Evaluasi

Pada tahap ini pekerja sosial harus mengevaluasi kembali semua kegiatan pertolongan yang dilakukan untuk melihat tingkat keberhasilannya, kegagalannya atau hambatan yang terjadi. Ada dua aspek yang harus dievaluasi oleh pekerja sosial yaitu tujuan hasil dan tujuan proses.

1. Tahap Terminasi

Tahap terminasi dilakukan bilamana tujuan prtolongan telah dicapai atau bilamana terjadi kegiatan referral atau bilamana karena alasan-alasan yang rasional klien meminta pengakhiran pertolongan atau karena adanya faktor-faktor eksternal yang dihadapi pekerja sosial atau karena klien lebih baik dialihkan ke lembaga-lembaga atau tenaga ahli lainnya yang lebih berkompeten. Pembagian kerja yang jelas akan mempermudah pelaksanaan pelayanan sosial sampai pada tujuan yang diharapkan. (Fahrudin, 2014, p. 65)

Penjelasan dari enam tahapan intervensi pekerjaan sosial diatas merupakan suatu tahapan-tahapan yang harus dipahami oleh seluruh pekerja sosial. Tahapan-tahapan ini bisa diterapkan pada individu, kelompok, dan masyarakat.

### 2.2.10 Peran-peran Pekerja Sosial

Peran pekerja sosial dalam menangani masalah mencakup masalah tiga level, yakni level mikro (individu), mezzo (keluarga dan kelompok kecil) dan makro (organisasi atau masyarakat). Pada masing-masing level peran pekerja sosial memiliki metode-metode yang berbeda-beda dalam penanganannya. Di level mikro dikenal sebagai *casework* (terapi perseorangan atau terapi klinis), di level mezzo ada beberapa metode *groupwork* (terapi kelompok) dan *family therapy* (terapi keluarga) dan pada level makro menggunakan metode *community development* (pengembangan masyarakat) atau *policy analisys* (analisis kebijakan). Peran yang dilakukan pekerja sosial dalam suatu masyarakat atau badan atau lembaga atau panti sosial akan beragam tergantung pada permasalahan yang dihadapinya. Peranan yang dilakukan oleh pekerja sosial antara lain:

1. Peranan sebagai Perantara *(Broker Roles)*.

Pekerja sosial menghubungkan antara anak asuh dengan sistem sumber baik batuan berupa materi ataupun non materi yang ada di suatu badan atau lembaga atau panti sosial baik panti asuhan, panti rehabilitasi dan lain-lainnya. Sebagai perantara pekerja sosial juga harus berupaya untuk mencari suatu jaringan kerja dengan suatu organisasi atau perusahaan yang dapat membantu pelayanan yang dibutuhkan.

1. Peranan sebagai Pemungkin *(Enabler Roles).*

Peranan ini merupakan peran pekerja sosial yang sering digunakan dalam profesinya karena peran ini menggunakan konsep pemberdayaan dan difokuskan pada kemampuan, keahlian, kapasitas, dan kompetensi anak asuh untuk menolong dirinya sendiri. Pada peranan ini pekerja sosial berperan sebagai konselor berusaha untuk memberikan peluang agar kebutuhan dan kepentingan anak asuh dapat terpenuhi dan terjamin, mengidentifikasi tujuan memfasilitasi untuk berkomunikasi, serta memberikan peluang untuk pemecahan masalah yang dihadapi anak asuh. Anak asuh melakukan semaksimal mungkin kemampuan dam kompetensi yang dimilikinya agar dapat bermanfaat dan dapat mengatasi permasalahannya.

1. Peranan sebagai Penghubung *(Mediator Role)*.

Peran pekerja sosial sebagai penghubung *(mediator role)* adalah bertindak untuk mencari kesepakatan, sebagai penengah dalam perbedaan, konflik antar anak asuh dengan keluarga, konflik antar anak asuh yang satu dengan yang lain, untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan dan memperoleh hak-hak yang semestinya.

1. Peranan sebagai Advokasi *(Advocator Role)*.

Peran yang dilakukan oleh pekerja sosial disini berbeda dengan advokat hukum. Advokat hukum dituntun melalui keinginan hukum sesuai dengan hukum pada suatu negara, sedangkan untuk advokat pekerja sosial dibatasi oleh kepentingan yang timbul dari anak asuh atau penerima pelayanan.

1. Peranan sebagai Perunding *(Conferee Role)*.

Peranan yang diasumsikan ketika pekerja sosial dan anak asuh atau penerima layanan mulai bekerja sama. Peran pekerja sosial ini dilakukan ketika pencarian data, pemberian gambaran pada korban.

1. Peranan Pelindung *(Guardian Role)*.

Peran pekerja sosial sebagai pelindung *(Guardian Role)* seringkali dilakukan oleh bidang aparat, akan tetapi pekerja sosial dapat berperan melindungi anak asuh atau penerima pelayanan, juga orang-orang yang beresiko tinggi terhadap kehidupan sosialnya.

1. Peranan sebagai Fasilitasi *(Fasilitator Role)*.

Seorang fasilitator pekerja sosial harus memberikan pelayanan yang bervariasi dalam memberikan pelayanannya tergantung pada kebutuhan serta masalah yang dihadapi anak asuh hal ini bertujuan agar anak asuh tidak merasa tertekan dan jenuh dengan pelayanan yang diberikan apabila pelayanan tersebut bervariasi dan menarik bagi anak asuh. Di samping itu, peran ini sangat penting untuk membantu meningkatkan keberfungsian anak asuh khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai yaitu dalam pemecahan masalah yang dihadapi anak asuh.

1. Peranan sebagai Inisiator *(Inisiator Role)*.

Peranan yang memberikan perhatian pada masalah atau hal-hal yang berpotensi untuk menjadi masalah.

1. Peranan sebagai Negosiator *(Negotiator Role)*.

Peran ini dilakukan terhadap anak asuh yang mengalami konflik atau permasalahan dan mencari penyelesaiannya dengan kompromi dengan persetujuan dan kesepakatan bersama anatar kedua belah pihak. Posisi seorang negosiator berbeda dengan mediator yang posisinya netral. Seorang negosiator berada pada salah satu posisi yang sedang memiliki konflik. (Suharto, 2017, p. 155)

**2.3 Konsep Pemberdayaan**

Pemberdayaan atau pemberkuasaan *(empowerment)* berasal dari kata *power* (kekuasaan atau pemberdayaan). Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga memiliki kekuatan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan, dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; menjangkau sumbersumber produksi yang memungkinkan mereka dalam meningkatkan pendapatan dan memperoleh barang dan jasa yang mereka perlukan; berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka. Pelaksanaan pemberdayaan melibatkan berbagai dimensi yang ada dari setiap pihak yang terlibat di dalamnya. Adapun pengertian pemberdayaan masyarakat yang lain sebagai berikut:

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagai pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta lembagalembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup adil untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. (Suharto, 2017, pp. 58–59)

Pemberdayaan masyarakat dikatakan sebagai serangkaian proses yang menghasilkan masyarakat yang mampu ikut melibatkan diri, dapat mengawasi, berpengaruh bagi apapun yang ada di sekitarnya yang membutuhkan peranannya. Semua itu didapatkan apabila masyarakat telah mendapat aktualisasi diri berupa keterampilan, pengetahuan, dan kuasa yang akan memiliki pengaruh bagi diri dan sekitarnya. Terkait dengan pemberdayaan masyarakat sebagai proses adalah sebagai berikut:

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses dalam bingkai usaha memperkuat apa yang lazim disebut community self-reliance atau kemandirian. Dalam proses ini masyarakat didampingi untuk membuat analisis masalah yang dihadapi, dibantu untuk menemukan alternatif solusi masalah tersebut, serta diperlihatkan strategi memanfaatkan berbagai kemampuan yang dimiliki. (Huraerah, 2008, p. 87)

Berdasarkan definisi di atas, dapat diketahui bahwa pemberdayaan masyarakat memiliki *goals* terhadap kemandirian dari masyarakat itu. Maka dengan berbagai proses yang terdiri dari berbagai tahap seperti analisis terhadap masalah yang dihadapi, membantu menemukan solusi, penyelesaian terhadap masalah bahkan diberi pemahaman mengenai pemanfaatan kemampuan yang dimiliki yang sebenarnya dapat menjadi kekuatan besar bagi masyarakat sehingga dapat membantu dalam peningkatan kualitas kehidupannya sendiri.

### 2.3.1Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat, sesuai dengan kebuthuhan, potensi, harapan, masalah yang ada didalam masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Pemberdayaan adalah proses kolaboratif. Oleh karena itu harus ada kerjasama sebagai partner.
2. Proses pemberdayaan menempatkan masyarakat sebagai aktor atau subjek yang kompeten dan mampu menjangkau sumber-sumber dan kesempatankesempatan.
3. Masyarakat harus melihat diri mereka sendiri sebagai agen penting yang dapat mempengaruhi perubahan.
4. Kompetensi diperoleh dan dipertajam melalui pengalaman hidup, khususnya pengalaman yang memberikan perasaan mampu pada masyarakat.
5. Solusi-solusi yang berasal dari situasi khusus, harus beragam dan menghargai keberagaman yang berasal dari faktor-faktor yang berada pada situasi masalah tersebut.
6. Jaringan-jaringan sosial informal merupakan sumber dukungan yang penting bagi penurunan ketegangan dan meningkatkan komepetensi serta kemampuan untuk mengendalikan seseorang.
7. Masyarakat harus berpartisipasi dalam memberdayakan diri mereka sendiri, tujuan, cara dan hasil harus dirumuskan oleh mereka sendiri.
8. Tingkat kesadaran merupakan kunci dalam pemberdayaan, karena pengetahuan dan mobilisasi tindakan bagi perubahan.
9. Pemberdayaan melibatkan akses terhadap sumber-sumber dan kemampuan untuk menggunakan sumber-sumber tersebut secara efektif.
10. Proses pemberdayaan bersifat dinamis, sinergis, evolutif, dikarenakan permasalahan selalu memiliki beragam solusi.
11. Pemberdayaan dicapai melalui struktur-struktur personal lain melalui pembangunan ekonomi secara paralel. (Suharto, 2017, p. 68)

Berbagai konsep pemberdayaan masyarakat yang berlaku dan darinya dijadikan acuan, maka secara umum kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat yang banyak dilakukan dapat dikelompokkan dalam beberapa kegiatan, yaitu sebagai berikut:

1. Bantuan Modal

Salah satu aspek yang dihadapi oleh masyarakat yang tidak berdaya adalah permodalan. Tidak adanya modal mengakibatkan masyarakat tidak mampu berbuat sesuatu untuk dirinya sendiri dan lingkungannya. Pemberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi menjadi faktor penting yang harus dilakukan. Dalam konteks ini, ada dua hal penting yang perlu dicermati, yaitu Pertama, lemahnya ekonomi masyarakat ini bukan hanya terjadi pada masyarakat yang memiliki usaha, tetapi juga masyarakat yang tidak mempunyai faktor produksi atau masyarakat yang pendapatannya bergantung pada gaji.Dalam pemberdayaan aspek ini, nampaknya pemberdayaan masyarakat perlu dipikirkan bersama. Kedua, perlunya mencermati usaha pemberdayaan masyarakat melalui aspek permodalan ini adalah, 1) bagaimana pemberian bantuan modal ini tidak menimbulkan ketergantungan masyarakat;2) bagaimana pemecahan aspek modal ini dilakukan melalui penciptaan sistem yang kondusif baru melalui usaha mikro, kecil, dan menengah untuk mendapatkan akses dilembaga keuangan;3) bagaimana skema penggunaan atau kebijakan pengalokasian modal ini tidak terjebak pada perekonomian subsistem.

1. Bantuan Pembangunan Prasarana

Usaha untuk mendorong masyarakat berdaya, maka perlu ada sebuah bantuan untuk pembangunan prasarana. Prasarana di tengah-tengah masyarakat yang tidak berdaya akan mendorong mereka menggali potensi yang dimilikinya dan mempermudah mereka melakukan aktifitasnya.

1. Bantuan Pendampingan

Pendampingan masyarakat memang perlu dan penting. Tugas utama pendamping adalah memfasilitasi proses belajar atau refleksi, dan menjadi mediator untuk masyarakat.

1. Kelembagaan

Keberadaan sebuah lembaga atau organisasi di tengah-tengah \masyarakat merupakan salah satu aspek penting untuk menciptakan keberdayaan. Adanya Lembaga akan mempermudah masyarakat untuk berkoordinasi, selain mereka dilatih untuk hidup tertib. Fungsi lembaga tersebut untuk memfasilitasi masyarakat dan memberikan kemudahan dalam melakukan akses-akses yang diinginkan seperti,permodalan, media musyawarah, dan lain sebagainya. (Suharto, 2017, p. 70)

Keempat kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut menjadi penting untuk dilakukan dan diterapkan dalam menunjang dan mempercepat akselerasi kualitas hidup masyarakat yang pada awalnya belum berdaya menjadi berdaya, dan mandiri.

### 2.3.2 Tahap-tahapan Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat sebagai proses merupakan serangkaian tahap tahap atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh semua pihak yang terlibat, pemangku kepentingan, elemen-elemen kemasyarakatan. Tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam pemberdayaan sebagai berikut:

Pertama, membantu masyarakat dalam menemukan masalahnya. Kedua, melakukan analisis (kajian) terhadap permasalahan tersebut secara mandiri (partisipatif). Kegiatan ini biasanya dilakukan dengan cara curah pendapat, membentuk kelompok-kelompok diskusi, dan mengadakan pertemuan warga secara periodik (terus menerus). Ketiga, menentukan skala prioritas masalah, dalam arti memilah dan memilih tiap masalah yang paling mendesak untuk diselesaikan. Keempat, mencari penyelesaian masalah yang sedang dihadapi, antara lain dengan pendekatan sosio-kultural yang ada dalam masyarakat. Kelima, melaksanakan tindakan nyata untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Keenam, mengevaluasi seluruh rangkaian dan proses pemberdayaan itu untuk dinilai sejauh mana keberhasilan dan kegagalannya. (Huraerah, 2008, p. 88)

Berdasarkan kutipan di atas, dapat diketahui bahwa pemberdayaan masyarakat memiliki tahap-tahap tertentu yang dimulai dengan tahap yang membantu masyarakat untuk menemukan masalah, di dalamnya diberikan perubahan kepada pemikiran masyarakat sasaran agar mereka menyadari adanya masalah. Kemudian tahap masyarakat melakukan kajian terhadap masalah yang ditemukan. Selanjutnya tahap di mana dilakukan pemilihan agar dapat terlihat mana masalah yang paling cocok untuk diselesaikan mengingat situasi yang mendesak.

Tahap lain yaitu tahap untuk melakukan perencanaan atas masalah yang akan diselesaikan, termasuk di dalamnya perencanaan program, perencanaan anggaran. Tahap selanjutnya merupakan tahap di mana masyarakat diberi aksiaksi yang melibatkan tenaga dan pikirannya seperti pelatihan-pelatihan, pembinaan, bantuan. Tahap terakhir yaitu tahap lanjutan di mana masyarakat yang telah mengikuti proses sebelumnya diberi kesempatan untuk berkembang sendiri sesuai kemampuannya, mengevaluasi apapun yang telah dilakukan demi perbaikan kualitas kehidupannya.

### 2.3.3 Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat

Keberhasilan atau pemberdayaan sanagt dipengaruhi oleh pendektan pemberdayaan yang digunakan. Proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan dapat dicapai dengan menerapkan pendekatan pemberdayaan yang disingkat menjadi 5P sebagai berikut :

1. Pemungkinan: menciptakan suasana atau iklim yang memungkinan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat.
2. Penguatan: memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh-kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.
3. Perlindungan: melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.
4. Penyokongan: memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya.Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
5. Pemeliharaan:memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat.Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha. (Suharto, 2017, pp. 66–67)

Terkait dengan kutipan di atas, dapat diketahui bahwa pendekatan pemberdayaan terdiri dari 5 bagian di antaranya pembebasan masyarakat dari sekatsekat menonjol yang selama ini menimbulkan keseganan untuk bergerak dan berubah. Kemudian dilakukan penguatan terhadap masyarakat agar mampu percaya diri atas hal-hal baik yang bisa dan dibantu dimaksimalkan. Lalu melindungi masyarakat dari ketertindasan atas persaingan yang tidak sehat, ketimpangan kubu kuat dan lemah serta kecil. Disokong oleh bimbingan dan dukungan lanjut agar peranan dan tugas kehidupannya dapat berjalan dengan seharusnya. Pemeliharaan merupakan pendekatan yang terakhir agar terjadi situasi yang stabil di antara kelompok-kelompok masyarakat yang telah diberdayakan sehingga terjadi keselarasan dan keseimbangan yang membuat masyarakat berusaha menjadikan kehidupannya berkualitas.

### 2.3.4 Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Pekerja sosial dalam melakukan pemberdayaan masyarakat harus ada strategi yang digunakan untuk menentukan tindakan apa yang akan dilakukan serta agar pemberdayaan yang dilakukan dapat tertuju dan terlaksana dengan baik pada masyarakat. Dalam beberapa situasi, strategi pemberdayaan dapat saja dilakukan secara individu; meskipun pada gilirannya strategi ini pun tetap berkaitan dengan kolektivitas, dalam artian mengkaitkan klien dengan sumber atau sistem lain di luar dirinya. Dalam konteks pekerja sosial pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga azas atau matra pemberdayaan: mikro, mezzo, dan makro. Azas pemberdayaan pekerja sosial yaitu:

1. Azas mikro, pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan, konseling, stress mangement, crisis intervention. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tuga-tugas kehidupannya. Model ini sering disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas.
2. Azas mezzo, pemberdayaan dilakukan terhadap kelompok klien. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya.
3. Azas makro. Pendekatan ini disebut juga sebagai strategi sistem besar, karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, lobbying, perorganisasian masyarakat, manajemen konflik, adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini. Strategi sistem besar memandang klien sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasisituasi mereka sendiri, dan untuk memiliki serta menentukan strategis yang tepat untuk bertindak. (Suharto, 2017, p. 66)

Pekerja sosial dalam melakukan strategi pemberdayaan masyarakat khususnya pada program Karang Taruna dalam Pemberdayaan Remaja dapat menggunakan azas makro karena dalam proses intervensinya dalam program pemberdayaan remaja ini dilakukan proses pengorganisasian masyarakat.

Pekerja sosial pada Karang Taruna dalam Pemberdayaan Remaja memiliki keterampilanketerampilan dalam dirinya karena dengan memiliki keterampilan maka akan mempermudah dalam proses pengembangan masyarakat, pemberian informasi terhadap klien sehingga dalam menggali suatu permasalahan yang bisa dilakukan dengan mudah untuk memberikan proses pertolongan.

## 2.4 Pengertian Peran

 Secara etomologi peran ialah seseorang yang melakukan tindakan yang dimana tindakan tersebut diharapkan oleh masyarakat lain. Artinya setiap tindakan yang dimiliki setiap individunya memiliki arti penting untuk sebagian orang. Peran merupakan perpaduan antara berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu yang digunakan dalam dunia sosiologi, menurut (Merton Raho, 2007:67)

“Peran didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan oleh masyarakat dari seseorang yang menduduki ststus tertentu, dalam hal ini juga berkaitan dengan hubungan berdasarkan peran yang dimiliki seseorang yang menduduki status sosial tertentu.”

 Peran sebuah gambaran interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai yang telah ditetapkan, berdasarkan dengan teori ini harapan dari peran menjadi pemahaman bersama yang menuntun individu untuk berperilaku dalam kesehariannya, seseorang yang mempunyai peran tertentu misalnya; sebagai dokter, guru, mahasiswa, orang tua dan lain sebagainya. Diharapkan seseorang yang mempunyai peran tersebut berperilaku sesuai dengan perannya(Linton(Cahyono, 2008: 194).

 Selain itu, (Kahn (Ahmad dan Taylor, 2009: 554) menyatakan bahwasanya lingkungan organisasi juga dapat mempengaruhi harapan setiap individu mengenai perilaku peran mereka, harapan tersebut berupa norma ataupun tekanan untuk bertindak dalam cara tertentu sehingga individu tersebut akan menerima pesan tersebut serta merespon denga berbagai cara, namun masalah akan muncul ketika pesan tidak tersampaikan dengan jelas dan tidak dapat diterima dengan mudah, serta tidak sesuai dengan daya tangkap si penerima pesan yang akan mengakibatkan pesan tersebut dinilai ambigu dan ketika hal ini terjadi maka individu akan merespon dengan cara yang tidak sesuai dengan harapan si pengirim pesan.

 Sehingga dapat disimpulkan bahwa peran adalah aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau sekumpulan orang untuk menghasilkan suatu perubahan yang diinginkan oleh berdasarkan kedudukan atau jabatan yang dimiliki seseorang tersebut.

### 2.4.1 Konsep Peran

Adapun konsep peran menurut Sukanto (2012:213) adalah sebagai berikut:

1. Persepsi Peran

Adalah pandangan kita terhadap tindakan yang seharusnya dilakukan pada situasi tertentu. Persepsi ini berdasarkan interprestasi atas sesuatu yang diyakini tentang bagaimana seharusnya kita berperilaku

1. Ekspektasi Peran

Ekspektasi Peran merupakan sesuatu yang telah diyakini orang lain bagaimana seseorang harus bertindak dalam situasi tertentu.

1. Konflik Peran

Saat seseorang berhadapan dengan ekspektasi peran yang berbeda, maka akan menghasilkan konflik peran. Konflik ini akan muncul saat seseorang menyadari bahwa syarat satu peran lebih berat untuk dipenuhi ketimbang peran lain.

### 2.4.2 Jenis Peran

Mengacu pada penjelasan di atas, peran dapat dibagi menjadi tiga jenis. Menurut Soekanto (2012:214) adapun jenis-jenis peran adalah sebagai berikut:

1. Peran Aktif

Peran aktif adalah peran seseorang sutuhnya selalu aktif dalam tindakannya pada suatu organisasi. Hal tersebut dapat diukur dari kontribusinya

1. Peran Partisipatif

Adlah peran yang dilakukan seseorang berdasarkan kebutuhan atau hanya pada saat tertentu saja

1. Peran Pasif

Adalah suatu peran yang tidak dilaksanakan oleh individu. Artinya, peran pasif hanya dipakai sebagai simbol dalam kondisi tertentu.

## 2.5 Pengertian Remaja

Pengertian Remaja adalah golongan manusia-manusia muda yang masih memerlukan pembinaan dan pengembangan ke arah yang lebih baik, agar dapat melanjutkan dan mengisi pengembangan yang kini telah berlangsung. Pemuda Indonesia dewasa ini sangat beraneka ragam, terutama bila dikaitkan dengan kesempatan pendidikan. Keragaman tersebut pada dasarnya tidak mengakibatkan perbed aan dalam pembinaan dan pengembangan generasi muda. Kedudukan pemuda dalam masyarakat adalah sebagai mahluk moral, mahluk sosial. Artinya beretika, bersusila, dijadikan sebagai barometer moral kehidupan bangsa dan pengoreksi. Sebagai mahluk sosial artinya pemuda tidak dapat berdiri sendiri, hidup bersama-sama, dapat menyesuaikan diri dengan norma-norma, kepribadian, dan pandangan hidup yang dianut masyarakat. Sebagai makhluk individual artinya tidak melakukan kebebasan sebebasbebasnya, tetapi disertai ras tanggung jawab terhadap diri sendiri, terhadap masyarakat, dan terhadap Tuhan Yang maha Esa. Secara hukum pemuda adalah manusia yang berusia 15 – 30 tahun, secara biologis yaitu manusia yang sudah mulai menunjukkan tanda-tanda kedewasaan seperti adanya perubahan fisik, dan secara agama adalah manusia yang sudah memasuki fase aqil baligh yang ditandai dengan mimpi basah dan keluarnya darah haid bagi wanita. Di dalam masyarakat, pemuda merupakan satu identitas yang potensial. Kedudukannya yang strategis sebagai penerus cita – cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan bangsanya. ( Mukhlish Muchad F. 2007 diakses 12 Januari 2012)

## 2.6 Pengertian Pemberdayaan Remaja

Pemberdayaan pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda. Di mana pemuda itu memiliki beragam potensi yang dimiliki oleh individu pemuda itu sendiri. Sehingga pemuda identik sebagai sosok yang berusia produktif dan mempunyai karakter khas yang spesifik yaitu revolusioner, optimis, berfikir maju, memiliki moralitas, dsb. Kelemahan mencolok dari pemuda adalah control diri dalam artian mudah emosional, sedangkan kelebihan pemuda yang menonjol adalah mau menghadapi perubahan, baik perubahan kultural maupun perubahan sosial dengan menjadi pelopor perubahan itu sendiri. (Dewanto Jati, Nugroho. 2012)

## 2.7 Tinjauan Tentang Karang Taruna

### 2.7.1 Pengertian Karang Taruna

Karang Taruna ialah sebagai wadah untuk generasi muda untuk meningkatkan, membudidayakan karya atau ide untuk membangun desa atau lingkungannya. Menurut buku pedoman Karang Taruna 2010, yang dimaksud Karang Taruna adalah organisasi sosial sebagai wadah pengembangan potensi generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran jiwa dan tanggung jawab sosial, dari, oleh, dan untuk masyarakat terutama generasi muda yang berada di wilayah desa atau komunitas atau setingkat dan juga bergerak dalam bidak kesejahteraan sosial guna kemajuan bersama.Jadi pada intinya selain menampung aspirasi, karang taruna juga berperan sebagai suatu wadah untuk menanamkan rasa nasionalisme, pengembangan potensi diri dan merupakan organisasi yang bergerak di bidang sosial. Dalam Permensos 25 tahun 2019 tentang Karang Taruna ialah Karang Taruna adalah sebagai berikut:

“Organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk generasi muda yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.”

Karang Taruna sangat penting dalam pemberdayaan remaja dalam mengatasi generasi muda yang sudah apatis terhadap lingkungannya, atau mampu mengatasi anak muda yang melakukan hal-hal negatif dan menimbulkan generasi muda yang memiliki ide dan karya untuk membangun sebuah lingkunganyang bergerak dari bidang sosialnya.

### 2.7.2 Tugas, Tujuan dan Fungsi Karang Taruna

 Tentunya dalam sebuah organisasi yang dibentuk masyarakat Karang Taruna ini mempunyai tujuan-tujuan dan fungsi-fungsi yang diantaranya dari Permensos 25 tahun 2019 tentang Karang Taruna ialah:

**2.7.2.1 Tujuan Karang Taruna**

1. mewujudkan kesadaran tanggung jawab sosial setiap generasi muda dalam mengantisipasi, mencegah, dan menangkal berbagai permasalahan sosial khususnya dikalangan generasi muda;
2. mengembangkan kemampuan generasi muda dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial;
3. membangun karakter generasi muda yang berpengetahuan, berkepribadian, terampil, cerdas, inovatif, dan berkarya;
4. mengembangkan potensi dan kemampuan generasi muda;
5. mengembangkan jiwa dan semangat kewirausahaan sosial generasi muda menuju kemandirian dalam upaya meningkatkan Kesejahteraan Sosial;
6. memotivasi generasi muda agar menjadi perekat persatuan dalam keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
7. menjalin sinergi dan kerja sama kemitraan antara generasi muda dengan berbagai pihak dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.

#### 2.7.2.2 Tugas Karang Taruna

* 1. Mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat; dan berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial serta program prioritas nasional.
	2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Karang Taruna bekerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, Kecamatan, Desa atau Kelurahan, potensi sumber kesejahteraan sosial, badan masyarakat.

#### 2.7.2.3 Fungsi Karang Taruna

Karang Taruna memiliki fungsi:

1. Administrasi dan manajerial;

2. Fasilitasi;

3. Mediasi;

4. Komunikasi, informasi, dan edukasi;

6. Pemanfaatan dan pengembangan teknologi;

6. Advokasi sosial;

7. Motivasi;

8. Pendampingan; dan

9. Pelopor.

Maka, bisa dipahami bahwa dari tugas, tujuan dan fungsi Karang Taruna ialah memotivasi generasi muda perekat kesatuan dan dapat mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu program Karang Taruna dalam Pemberdayaan Remaja dapat dilaksanakan dengan adanya patokan dari Permensos 25 tahun 2019 tentang Karang Taruna.